



IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur




Jl. Pahlawan 110 Surabaya



REFORMASI BIROKRASI



Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

-  **Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi**
-  **Pemerintah yang bersih dan bebas KKN**
-  **Peningkatan Pelayanan Publik**





ZONA INTEGRITAS

1



KOMITMEN

Komitmen pimpinan dan semua karyawan dengan melibatkan bawahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama

2



KEMUDAHAN PELAYANAN

Menyediakan Fasilitas Lebih Baik dan Semangat Hospitality untuk kepuasan publik

3



PROGRAM YANG MENYENTUH MASYARAKAT

Membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut

4



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya

5



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat



Tugas dan Fungsi

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

Fungsi Kehumasan

Fungsi Keprotokolan

Fungsi Kerjasama

Bagian PPI

Bagian Media & Dokumentasi

Bagian Protokol

Bagian Administrasi Kerjasama

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016



IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

PENGUNGKIT

MANAJEMEN PERUBAHAN

Upaya Unit Kerja dalam merubah mind set dan budaya organisasi memiliki budaya kerja yang bersih dan melayani

MANAJEMEN SDM

Upaya Unit Kerja dalam mengelola SDM dan terus menerus meningkatkan profesionalisme dan integritas SDM

PELAYANAN PUBLIK

Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan pelayanan publik dengan inovasi menjadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat

TATA LAKSANA

Upaya Unit Kerja dalam mengatur tata kerja untuk meningkatkan efisiensi kerja

AKUNTABILITAS

Upaya Unit Kerja dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya

PENGAWASAN

Upaya Unit Kerja dalam memastikan seluruh anggota unit kerja melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan bebas penyimpangan.

HASIL

PEMERINTAH BERSIH DAN BEBAS KKN

- Survey persepsi anti Korupsi
- Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan/Pengawasan

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Survey Persepsi Pelayanan Publik



MANAJEMEN PERUBAHAN

Tim Kerja



Dokumen Rencana
Pembangunan
Zona Integritas



Pemantauan dan
Evaluasi
Pembangunan
WBK/WBBM



Perubahan pola
pikir dan budaya
kerja



Biro humas dan Protokol selalu mengutamakan semangat bekerja dalam tim, khususnya dalam pelaksanaan Peliputan dan Keprotokolan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Kelompok Budaya Kerja belum terbentuk.



TATA LAKSANA

Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

SOP sebagian besar telah disusun berdasarkan tugas pada setiap fungsi

E-Office

Biro Humas dan Protokol telah menerapkan Sistem Informasi Penomoran Dokumen (Sinomen) yang dapat diakses secara online dan digunakan untuk mempercepat penomoran dokumen (SPT, Nota Dinas dan SK)

Keterbukaan Informasi Publik

Website Biro Humas dan Protokol : www.birohumas.jatimprov.go.id

Website Analisis Isu Publik : www.humasjatim.id

Saat ini sedang dikembangkan website/aplikasi pusat data kerjasama provinsi Jawa Timur





MANAJEMEN SDM



Perencanaan Pegawai (Bezzeting) sesuai ketentuan BKD menggunakan aplikasi formasi.menpan.go.id

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Mutasi Pegawai dilakukan satu pintu melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov Jatim

Pola Mutasi Internal

Biro Humas dan Protokol menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan/bimtek/kursus pengembangan kompetensi pegawai

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Penetapan kinerja individu

SKP berdasarkan tugas Jabatan telah disusun dengan baik, sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) masih belum maksimal.

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai

Sampai dengan saat ini tidak ada Pegawai dilingkungan Biro Humas dan Protokol yang mendapatkan hukuman disiplin.

Sistem Informasi Kepegawaian

Penggunaan E-Master sebagai pusat data kepegawaian telah optimal.



AKUNTABILITAS



Keterlibatan pimpinan

Pimpinan selalu dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan strategis maupun dalam persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di lapangan.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengedepankan prinsip akuntabel (mendokumentasikan pekerjaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjutnya)



PELAYANAN PUBLIK



Standar Pelayanan

Budaya Pelayanan Prima

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Sebagai jaminan pelaksanaan tugas di lapangan dengan baik, disusun SOP teknis untuk setiap kegiatan di lapangan, khususnya untuk kegiatan Keprotokolan dan Peliputan.

Pelayanan Prima Bagi Petugas keprotokolan dan kehumasan, mulai dari standarisasi pakaian lapangan, dll.

Survey Kepuasan masyarakat dilakukan untuk kegiatan yang menjadi output Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada penerima layanan keprotokolan / produk informasi.



PENGAWASAN

Pencegahan Gratifikasi dilakukan dengan cara menempel stiker larangan dan bahaya korupsi, serta dilakukan penekanan oleh pimpinan pada setiap jenjang struktur organisasi.

Pengendalian Gratifikasi

Dilakukan pemeriksaan secara berkala oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Penerapan SPIP

Pengaduan Masyarakat

Belum tersedia kanal khusus, sementara memanfaatkan Sistem LAPOR! SP4N yang terintegrasi dengan Ombudsman RI dan Kominfo RI.

Belum dibentuk/ ditetapkan tata cara pelaporan pelanggaran atau ketidakpuasan di internal OPD.

Whistle-Blowing System

Penanganan Benturan Kepentingan

Setiap konflik kepentingan didalam OPD diselesaikan dengan musyawarah dan kebijaksanaan pimpinan.





PEMERINTAH BERSIH DAN BEBAS KKN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN, SERTA MEMBERIKAN
PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT**

**N
K RUPSI**





TERIMA KASIH



Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Jl. Pahlawan 110 Surabaya